

Antagonisme Sosial, Diskonsensus, dan Rantai Ekuivalensi: Menegaskan Kembali Urgensi Model Demokrasi Agonistik¹

Hasrul Hanif²

Abstract

Debates on linkages between democracy and welfare remain fascinating issues in contemporary democracy studies, especially in Indonesia. However, mainstream studies on such issues were influenced, foremost, by political economy approaches and classic liberalism. Thus, mainstream studies pay less attentions on deconstruct both the idea of democracy and welfare and tend to essentialize democracy and welfare. It also insulate politics from conflict and social antagonisms. Rather than analysing pattern of linkages between welfare and democracy, this study inquire about 'welfare' itself - as common goods- is empty/floating signifier and then put emphasis on welfare -as articulatory social practices and discursive reality- always been produced, presented and represented in and through political process or battle for hegemony. Moreover, whilst this study underline the primacy of political and discursive

¹ Tulisan ini sekedar 'dialog' awal terhadap gagasan tentang praktik sosial yang diskursif baik yang dikembangkan dalam tradisi pemikiran demokrasi deliberatif yang dikembangkan dalam tradisi mazhab kritis maupun pemikiran demokrasi agonistik yang dibaca ulang dan dikembangkan lebih jauh secara cerdas oleh para Pemikir Post-Marxis sebagai respon terhadap gagasan demokrasi deliberatif dan model demokrasi agregatif dalam kajian politik kontemporer. Dalam penulisan jurnal ini, penulis mengucapkan terima kasih terhadap DR. Nico Warrouw, Budi Irawanto, MA dan Franciscus Vicky Djalong, S.Sos yang selalu menjadi partner inspiratif sekaligus kritis dalam mendiskusikan gagasan-gagasan pluralis radikal pada pemikir post-marxis, khususnya Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe.

² Bekerja di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.

social practices, it strongly differ from model of deliberative democracy (liberal pluralist) since it re-emphasize agonistic model of democracy, that was introduced by post-marxist or radical pluralist thinkers. Last of all, agonistic model of democracy deem conflict, undecidability and social antagonism as virtue of democracy and main features of political life.

Kata-kata kunci:

Diskonsensus, Logika Ekuivalensi, dan Demokrasi Agonistik

Arus utama berbagai kajian tentang demokrasi dan kesejahteraan serta korelasi keduanya masih kuat di pengaruhi oleh tradisi prosedural-elektoralisme dan kental dengan nuansa ekonomi politik. Berbagai tulisan yang ada lebih banyak melacak hubungan antara pembangunan ekonomi dan demokrasi (atau kadang tipe rejim). Singkat kata, berbagai studi yang ada mencoba melacak, terutama, seberapa jauh korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan tumbuhkembangnya nilai dan praktik demokrasi di sebuah negara (bandingkan Przeworski, Alvarez, Cheibub, & Limongi, 2000; Kwon, 2007). Sebaliknya, ada juga yang menakar seberapa dalam mekanisme demokrasi mampu memastikan adanya redistribusi *public goods* secara merata kepada warga serta seberapa memungkinkan proses demokratisasi menjadi sarana bagi pengurangan kemiskinan (Foster & Rozensweig, 2004).

Arus utama pendekatan dalam mengkaji hubungan demokrasi dan kesejahteraan juga lebih banyak menggunakan model-model teoritik formal yang dibangun dari cara berpikir esensialis. Dalam bayangan para pemuja esensialis, kesejahteraan secara esensial dipahami sebagai praktik "obyektif" yang bisa dijumpai dalam perhelatan pemilihan umum, jaminan sosial, dsb (bandingkan Weeden, 2004: 275). Lebih jauh, cara berpikir esensialis ini melihat kesejahteraan dan demokrasi itu sendiri sebagai sebuah yang *fix* sehingga cenderung mengabaikan dimensi historis yang sangat dinamik yang membentuk dan mempola konstruksi gagasan demokrasi dan kesejahteraan itu sendiri dalam setiap ruang dan waktu secara berbeda.

Akibatnya berbagai studi tentang demokrasi dan kesejahteraan cenderung terjebak untuk memahami gagasan tersebut dari etika universal (bandingkan Mamdani, 1996: 9-10). Ketika berbagai studi tersebut gagap melihat kecenderungan yang berbeda dari etika ideal dalam kenyataan politik maka yang dilakukan adalah menyematkan kata-kata sifat (adjektif) terhadap gagasan-gagasan tersebut. Muncullah istilah *quasi-democracy*, *patronage democracy*, *pseudo-democracy*, *ersatz capitalism*, dsb (lihat Collier & Levistky, 1996).

Tulisan ini berusaha keluar dari ortodoksi kajian yang sudah ada dengan memproblematisasi gagasan kesejahteraan dan demokrasi itu sendiri serta mengedepankan argumen-argumen dasar yang justru seringkali diabaikan. *Pertama*, kesejahteraan sendiri merupakan gagasan yang 'kosong'/membangsang' sekaligus diskursif (bandingkan dengan M. O'Brien & Penna S., 1998). Gagasan tersebut akan selalu ditafsir melalui antagonisme-antagonisme sosial dan keberbedaan daripada hadir sebagai ide pra-konsepsi dan kanon/korpus tertutup. Oleh karena itu tulisan ini cenderung mengemukakan pertanyaan-pertanyaan epistemologis (atau de-ontologisasi) dibandingkan mengedepankan asumsi-asumsi ontologis.

Kedua, apa yang dipahami sebagai makna kesejahteraan 'yang benar' terhadap dalam sebuah babak atau periodisasi sosial tertentu lebih merupakan normalisasi diskursus tertentu sendimentasi sosial sekaligus dislokasi sosial yang lahir dari pertarungan merebut hegemoni. Sebagai *common goods*, tafsir atas kesejahteraan sebagai kepentingan publik atau kepentingan publik yang mendasari gagasan kesejahteraan tidak pernah pula hadir pra-konsepsi. Kepentingan justru terbentuk dan baru hadir ketika gagasan kesejahteraan tersebut meng-ada. Problematisasi ini penting untuk menghindari gagasan kesejahteraan yang dibayangkan sebagai *common goods* agar tidak menjadi 'totalitarianisme' baru (bandingkan dengan Nancy, 2007: 43).

Ketiga, bila gagasan kesejahteraan lahir dari antagonisme-antagonisme sosial yang tidak terelakkan maka tidak menjadi penting lagi untuk menempatkan konflik sebagai 'patologi' yang kemudian membuat para pemikir memandatkan mekanisme demokrasi agar mampu mengelolanya secara formal dalam tata pelebagaan formal dan institusional seperti mekanisme *checks and balances*, dsb. Tulisan ini justru ingin meradikalisasi kembali semangat-semangat libertarian

yang menempatkan kebebasan sebagai watak penting dalam proyek kemanusiaan modern dengan menempatkan konflik justru sebagai nilai kebajikan (*virtue*) dasar dari demokrasi itu sendiri.

Oleh karena itu, tulisan ini akan mengemukakan gagasan demokrasi agonistik yang kembali menegaskan adanya diskursivitas pada semua praktik sosial yang ada. Namun berbeda dengan tradisi demokrasi deliberatif (pluralis liberal), tulisan ini juga justru menolak adanya keyakinan rasional universal dan prosedur obyektif yang mampu menciptakan konsensus. Sebab bagaimanapun dalam praktik politik selalu muncul politik identitas yang menghadirkan keragaman nilai dan pluralitas logika subyektif yang tidak mungkin diabaikan. Dengan kata lain, model demokrasi agonistik (pluralis radikal) menerima asumsi bahwa konflik, diskonsensus dan antagonisme sosial merupakan hal yang tidak terhindarkan. Bukan berarti menolak kesepatan sosial atau konsensus begitu saja, tulisan ini justru ingin mempertanyakan kecenderungan tradisi liberal klasik yang lebih memendam antagonisme yang tidak terhindarkan tersebut dalam institusi-institusi demokrasi formal, seperti partai politik, PEMILU, dsb, daripada mendorongnya secara radikal secara deliberatif dan diskursif agar terbangun komunikasi intersubyektif yang melahirkan 'aturan main (*rule of the games*)' baru, 'kesepakatan' atau rantai ekuivalensi (*chain of equivalence*) (Bandingkan Cunningham, 2002: 184, 191).

Semua argumentasi tersebut dibangun di atas bayangan tentang demokrasi sebagai sebuah proses yang dinamis, sesuatu yang menjadi (*becoming*) bukan jadi (*being*). Demokrasi dipahami sebagai sesuatu yang multilinear dan kompleks dibandingkan sebagai arus unilinear yang bisa ditarik proses konsolidasi/de-konsolidasinya dalam tahapan demi tahapan.

Radikalisasi Watak Kontijensi *Common Goods*

Imaji kolektif tentang kesejahteraan sebenarnya merupakan salah satu hasrat paling purba dalam nalar pikir manusia modern. Bahkan ide tentang progresivitas yang telah menjadi mesin penggerak modernitas pada akhirnya juga bermuara pada mimpi akan hasrat hidup lebih baik atau lebih sejahtera. Para penganjur Teori Kontrak Sosial pun meyakini bahwa hasrat inilah yang mendasari praktik volunterisme rakyat dengan menyerahkan kedaulatan yang dimiliki oleh masing-masing individu

secara esensial alamiah untuk membentuk entitas kolektif yang bernama negara. Negara kemudian menjalankan mandat untuk memastikan kepentingan bersama yang ada tercapai. Dengan demikian, kesejahteraan telah menjadi *common goods*³ atau hasrat kolektif yang mempertautkan satu warga negara dengan warga negara lainnya dalam sebuah tindakan kooperasi yang bersifat altruistik sebagaimana pernah dideklarasikan oleh Cicero: "*Salus Populi Suprema lex Esto*" (kesejahteraan adalah hukum tertinggi) (Miller, 2004: 9).

Lebih jauh, ada beberapa alasan lainnya untuk menegaskan kesejahteraan sebagai *common goods*, yaitu: *pertama*, gagasan kesejahteraan lahir dari fondasi sosial berupa solidaritas sosial. Pertanyaan yang justru ingin diajukan dalam tulisan ini adalah bagaimana solidaritas sosial sebagai watak normatif dihadirkan dan diinstitutionalisasi. Solidaritas sosial diantara warga yang pada hakekatnya sebagai kewajiban kolektif terhadap diri mereka sendiri justru diagungkan dan dipatuhi beserta seabrek kontradiksi di dalamnya. Kondisi tersebut membuat pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab dari sekedar argumen tentang urgensi gagasan kesejahteraan sebagai upaya mengembangkan keamanan sosial dan koreksi terhadap kegagalan pasar (bandingkan Eriksen, 1996: 60-62).

Kedua, solidaritas sosial sebagai fondasi penting bagi gagasan kesejahteraan yang lahir dari sebuah praktik diskursif akan selalu meniscayakan adanya ketegangan dan negosiasi diskursif. Sebagaimana argumentasi Amartya Sen (2001: 36): "*Kesulitan kedua dari welfarism timbul dari penafsiran khusus atas kemakmuran yang diberikan oleh kemanfaatan. Menilai kesejahteraan seseorang semata-mata dalam ukuran kebahagiaan atau pemenuhan-keinginan mengandung sejumlah keterbatasan nyata. Keterbatasan ini sangat merusak dalam konteks perbandingan antar personal atas kemakmuran, sebab jangkauan kebahagiaan itu mencerminkan apa yang dapat diharapkan oleh seseorang dan bagaimana "kesepakatan sosial" itu tampak dalam perbandingan*

³ *Common goods* diartikan sebagai sesuatu hal yang hendak dicapai oleh seluruh warga negara –seluas-luasnya– melalui sarana-sarana politik dan aksi kolektif dari warga negara yang berpartisipasi dalam tata pemerintahan mereka sendiri (*self government*). Dengan kata lain, kesejahteraan, kesetaraan, kebebasan, dsb merupakan *common goods* merupakan hasrat publik yang bisa dicapai melalui politik kewargaan (*citizenship*), aksi kolektif dan partisipasi aktif dalam praksis politik dan pelayanan publik (Bevir, 2007: 116-117)

dengannya". Lagi-lagi, dengan semangat anti fondasionalisme, tulisan ini ingin menegaskan bahwa dibutuhkan sebuah mekanisme politik yang bisa memastikan gagasan kesejahteraan merupakan hasil dari 'kesepakatan sosial'/'ketidaksepakatan sosial' yang sangat bersifat kontijensi. 'hasil' ini lahir dalam ruang publik politis (*political public sphere*) dimana diskursus tentang kesejahteraan menjadi diskursus publik yang dinegosiasikan dan diperdebatkan secara dinamis.

Bila kesejahteraan sebagai *common goods* adalah hasil dari imaji kolektif maka mau tidak mau imaji kolektif tersebut harus tunduk pada kesepakatan-kesepakatan sosial yang lebih bersifat historis-kultural. Meskipun hasrat kolektif ini telah tertanam dalam imaji sosial secara trans-historis namun wujud nyata dari kesejahteraan itu tidak serta merta secara esensial terwujudkan secara konkret. Ada kesadaran ruang dan waktu serta pengalaman sosial yang membuat makna kesejahteraan terdefiniskan melalui proses negosiasi, diskonsensus dan konsensus terus-menerus. (bandingkan dengan Miller, 2004).

Lebih jauh, *common goods* sebenarnya tidak disediakan hanya untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan ekonomi secara obyektif dan memaksimalkan utilitas semata. Sebab pada dasarnya, *goods* itu sendiri adalah apapun yang mampu memuaskan keinginan, sedangkan keinginan itu sendiri adalah kebutuhan-kebutuhan yang manusia persepsikan sebagai sesuatu yang penting atau dihasratkan untuk dipenuhi. Tentu saja setiap keinginan-keinginan ini sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, tradisi dan interaksi sosial. Oleh karena itu, setiap keinginan kolektif akan dimunculkan dari proses debat, intrik, konflik, atau bisa pula dari transaksi-transaksi sukarela. Apa yang kemudian dikenal sebagai *common goods* adalah imaji kolektif tentang apa yang menjadi kebutuhan dan hasrat dasar manusia yang dirumuskan melalui proses-proses yang sangat cair, merupakan konstruksi antagonisme sosial dan dikontestasikan secara politik (Sargeson, 2002: 5).

Lebih jauh, kesejahteraan sebagai *common goods* bukan hanya memiliki watak antagonis di dalam dirinya namun juga bernuansa kontijensi (*contingency*) yang sangat kental. Sebagai *common goods*, gagasan kesejahteraan menjadi sangat diskursif sekaligus menjadi ranah yang sangat politis (*the political*) bagi kekuasaan, konflik dan atagonisme sosial (Bandingkan dengan Mouffe, 2005: 10). Sebagaimana argumentasi pemikir post-fondasionalisme, kesejahteraan sebagai *common goods*,

secara ontologis, selalu menampakkan karakter kontijensinya ketika tidak akan pernah menemukan 'dasar yang final' (*final ground*) atau ketidakmungkinan menemukan totalitas esensinya. *Common goods* tersebut berada dalam titik kontijensi ketika tidak lagi dipengaruhi oleh masa lalu, asal-usul yang absolut, asal-usul sosial. Gagasan ini menjadi kontijen secara 'obyektif' ketika selalu menjadi 'berbeda' (*different*) dan menjadi kontijen sosial ketika justru lahir bukan dari konsensus (baca: demokrasi formal) melainkan dibesarkan dari diskonsensus dan ketidaksepakatan-ketidaksepakatan sosial atau ekuivalensi (*equivalence*) dan keberbedaan (*difference*) (Marchart, 2007: 26-27; 136-137; Laclau and Mouffe, 1985: 113-114).

Dengan kata lain, kesejahteraan merupakan petanda yang kosong (*empty signifier*) yang pada momen sosial tertentu bertransformasi menjadi petanda mengambang (*floating signifier*) -yang kemudian kita pahami sebagai *common goods*-, melalui artikulasi-artikulasi sosial (yang berlangsung dalam 'arena pertarungan' bagi hegemoni) yang membentuk secara diskursif untuk menjadi diskursus hegemonik secara parsial. Proses ini lahir dari berbagai antagonisme sosial yang berhasil menciptakan dislokasi sekaligus sendimentasi sosial, eksklusi sekaligus inklusi, ekuivalensi sekaligus keberbedaan (bandingkan dengan Laclau and Mouffe, 1985; Laclau, 2007).

Dari Nalar Publik Universal ke Logika Ekuivalensi

Bila argumentasi di atas disepakati, persoalan berikutnya adalah bagaimana menemukan konstruksi tentang ide kesejahteraan yang berhasil didefinisikan secara bersama-sama dalam masyarakat modern yang memiliki asal usul dan basis nalar sosial yang beragam, baik dilihat dari moralitas, dasar filosofis dan agama. Atau dengan kata lain, ketika masyarakat plural membutuhkan adanya titik persilangan yang bisa mempertemukan nalar sosial yang sangat heterogen bagaimana mengelolanya? Ada baiknya untuk menjawab pertanyaan tersebut kita kemukakan terlebih dahulu jawaban-jawaban dari tradisi demokrasi liberal dan kemudian dilanjutkan problematika yang muncul dalam jawaban-jawaban tersebut.

Dalam tradisi demokrasi deliberatif, pertanyaan mendasar di atas dijawab dengan mengemukakan pentingnya kehadiran nalar yang mampu menjadi basis penting bagi penciptaan kohesi dan kerjasama

sosial dalam menjaga sistem dan tata pemerintahan yang ada. Nalar baru inilah yang kemudian dikenal sebagai nalar publik (*public reason*).

Dengan catatan, sebagaimana pernah diingatkan oleh John Rawls (1997: 94) tidak semua nalar kolektif masyarakat sipil otomatis akan menjadi merupakan nalar publik. Misalnya, dalam rejim yang aristokrat ataupun otoriter, ketika ide kemaslahatan masyarakat (*good of society*) dihadirkan, hal tersebut tidak akan pernah dihasilkan oleh publik, walaupun ide tersebut muncul maka semuanya akan lebih dihasilkan dari nalar penguasa. Nalar publik hanya menjadi ciri khas masyarakat demokratis. Sebuah nalar kolektif akan dianggap sebagai nalar publik apabila memenuhi syarat sebagai berikut: (1) jika nalar ini muncul dari warga negara yang berada dalam derajat status kewarga negaraan yang setara, (2) yang menjadi subyek dalam nalar mereka adalah kemaslahatan publik (*good of public*) dan terkait dengan keadilan yang fundamental, dan (3) watak dan isinya merupakan hasrat publik yang berisi mimpi dan prinsip-prinsip ideal yang terekspresikan melalui konsepsi masyarakat tentang keadilan politik. Oleh karena itu, hanyalah nalar kolektif yang mampu dikomunikasikan intersubjektif dan dipahami oleh seluruh elemen dan tentu saja memiliki justifikasi yang akan menjadi nalar publik (Postema, 1995a: 70).

Nalar publik bukan hanya akan menjadi komitmen teoritik semata tapi juga harus menjadi basis moralitas utama dan tujuan yang regulatif dalam berbagai praktik politik yang ada. Sebagaimana diungkapkan oleh Postema (1995b: 356): "adanya penciptaan kesepakatan diantara anggota-anggota komunitas harus diset sebagai proyek yang tidak pernah selesai dari proses pengelolaan nalar dan penilaian praktis".

Bila demikian dibutuhkan adanya ruang (*sphere*) yang leluasa agar proses penciptaan dan kehadiran nalar publik tersebut bisa berlangsung. Ruang inilah yang kita sebut sebagai ruang publik politis. Ruang ini adalah arena interaksi dimana berlangsung kondisi-kondisi komunikasi yang memungkinkan para warga negara untuk membentuk opini dan kehendak bersama secara diskursif. Tentu saja, ruang tersebut akan muncul apabila: (1) ada komunikasi politis dengan menggunakan bahasa yang sama dengan semantik dan logika yang digunakan secara konsisten (2) semua partisipan memiliki peluang yang sama untuk mencapai konsensus yang fair dalam memperlakukan partner komunikasinya sebagai pribadi-pribadi otonom yang mampu bertanggungjawab dan bukanlah alat yang

dipakai untuk tujuan-tujuan di luar diri mereka. Singkatnya dalam ruang publik yang politis ini harus bersifat inklusif, egaliter dan bebas tekanan (Hardiman, 2005: 43-44).

Ruang publik politis tersebut bukanlah sekedar institusi atau apalagi organisasi. Ruang publik politis juga bukan serangkaian norma kerangka norma dengan peran dan kompetensi yang dibedakan, regulasi keanggotaan, dsb. Gambaran yang terbaik tentang ruang publik politis adalah ini merupakan jaringan yang kompleks untuk mengkomunikasikan informasi dan titik pandang dimana aliran komunikasi, dalam proses, disaring dan disintesis dalam apa yang disebut sebagai opini publik. Seperti juga kehidupan secara keseluruhan, ruang publik direproduksi melalui aksi-aksi komunikatif -yang ditandai tidak hanya oleh fungsi dan isi dari komunikasi keseharian saja tapi juga adanya ruang sosial '*social space*' yang dihasilkan dalam aksi komunikatif itu (Habermas, 1996: 360).

Hal penting yang perlu dicatat adalah ruang publik politis tidak akan pernah berjalan dalam praktik sosial yang dominatif dan hegemonik. Sebab proses interaksi sosial yang simetris tidak memungkinkan terjadi ketika ada dominasi. Negosiasi dan konsensus yang fair tidak akan pernah terbangun dengan baik bila elemen-elemen yang terlibat dalam aksi komunikatif tersebut memiliki kapasitas untuk memanipulasi ide dan gagasan.

Di sinilah adanya kebebasan (*freedom*) menjadi prasyarat penting. Nalar publik tidak akan terkonstruksi dan ruang publik politis tidak akan tercipta tanpa adanya kebebasan setiap warga negara -baik sebagai entitas individu atau menjadi bagian dari entitas kolektif- untuk terlibat dalam proses negosiasi dan konsensus tersebut. Dalam konteks pencapaian kepentingan bersama, kebebasan sendiri menjadi media yang sangat dasariah untuk mencapainya dan sekaligus merupakan bagian dari kepentingan bersama yang ingin diraih.

Dalam konteks ini, kebebasan memainkan dua peran sekaligus, yaitu: peran konstitutif (*constitutive role*) dan peran instrumental (*instrumental role*). Kebebasan di satu sisi memainkan peran konstitutif yang berkaitan dengan pentingnya kebebasan substantif untuk memperkaya kehidupan manusia. Yang dimaksud dengan kebebasan substantif adalah kapabilitas dasar untuk bisa menghindari bentuk-bentuk deprivasi sosial, seperti kelaparan, penyakit endemik, kematian dini sekaligus kemampuan untuk membaca dan menghitung, menikmati keterlibatan dalam partisipasi

politik, kebebasan untuk berbicara, dsb. Dengan kata lain, seluruh aktivitas-aktivitas untuk mencapai kesejahteraan sebagai *common goods* (baca: pembangunan) harus dipahami sebagai proses untuk memperluas kebebasan manusia sebagai hasil.

Di sisi lain, kebebasan memainkan peran-peran instrumentatif yang efektif untuk mendorong adanya progresivitas baik progresivitas ekonomi maupun sosial. Bila kita mendiskusikan peran kebebasan secara instrumentatif, hal ini berarti diskusi ini akan berkaitan dengan sejumlah tipe hak, kesempatan, dan pemanfaatan (*entitlement*) yang berbeda-beda yang digunakan untuk memperoleh kebebasan substantif dan kemajuan (Sen, 1999: 36-37).⁴

Tentu saja, dalam hal ini kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan untuk kebebasan itu sendiri (*freedom qua freedom*) sebagaimana mimpi-mimpi kaum libertarian serta bukan pula kebebasan yang didominasi oleh mereka yang bisa memperoleh manfaat yang lebih besar. Kebebasan hanya akan bisa diterima sepanjang bisa menjadi kebebasan positif yang mampu memfasilitasi terciptanya nalar publik dan disepakatinya *common goods* dan menjadi bagian dari kesejahteraan itu sendiri. Kebebasan sejatinya pula harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sebagai *fairness* dimana komunitas-komunitas atau anggota masyarakat yang paling tidak beruntung juga menjadi bagian dari proses kebebasan itu sendiri secara setara (bandingkan Sen, 2001: 44; Rawls, 2004: 15).

Al hasil, selain menjadi bagian dari pergulatan diskursus publik tentang *common goods* itu sendiri, kebebasan adalah prasyarat mutlak agar proses penciptaan nalar publik dalam nalar publik politis bisa berjalan. Sebab pada hakekatnya, ruang publik tersebut bukanlah ruang yang a-historis dan normatif. Ruang publik dimana proses-proses refleksi publik berlangsung merupakan arena kontestasi, negosiasi, konflik dan debat terus-menerus sehingga mensyaratkan adanya kesamaan kapasitas aktor. Kebebasan adalah katalisator agar proses tersebut berlangsung dalam kesetaraan sekaligus plural (*equality of difference*). Bahkan, dengan

⁴ Misalnya Amartya Sen (1999:10) mencatat ada 5 bentuk kebebasan yang sifatnya instrumentatif, yaitu: (1) kebebasan politik, (2) ketersediaan fasilitas ekonomi, (3) kesempatan-kesempatan sosial, (4) jaminan transparansi dan (5) keamanan protektif atau jaring pengaman sosial.

menggunakan kebebasan instrumentatif atau *intermediate goods*, mereka yang memperoleh keuntungan terakhir dalam masyarakat harus dipastikan menjadi bagian dari diskursus publik tanpa pengecualian. Dengan kebebasan pula, nalar publik yang menjadi prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar kolektif dalam substansi diskursus publik tentang kesejahteraan akan terumuskan dengan lebih adil karena tidak elitis.

Penjelasan panjang lebar dalam tradisi pluralis liberal tersebut menarik namun sebenarnya masih menyimpan problematika yang disadari atau tidak justru membahayakan semangat-semangat libertarian yang diusung secara kuat dalam gagasan demokrasi itu sendiri. *Pertama*, meskipun para pemikir demokrasi pluralis liberal (deliberatif) mengakui upaya untuk menegakan kembali semangat-semangat kebebasan sebagai norma dasar libertarian serta mengiyakan bahwa konflik menjadi hal yang tak terelakkan namun ada kecenderungan kuat dalam gagasan demokrasi pluralis liberal untuk menguburkan kenyataan konflik itu dalam mekanisme demokrasi yang ada-daripada mengakuinya dan secara politik dikonfrontasikan- sehingga seakan-akan konflik dan antagonisme tidak pernah hadir dan nyata. Bahkan mencoba mengisolasi politik dari kenyataan tersebut karena menganggapnya sebagai fakta patologis. Pengakuan atas kecenderungan konfliktual, bagi tradisi pluralis liberal, akan membahayakan demokrasi karena akan mendorong kekerasan. Kalau mengakuinya, tradisi demokrasi liberal cenderung mendorongnya sebagai identitas privat yang terpisah dari realitas publik (bandingkan Mouffe, 1996: 248).

Kedua, para pemikir demokrasi liberal membayangkan bahwa keragaman tersebut akan bisa dipertemukan dan membuka peluang bagi terwujudnya konsensus dalam nalar publik. Nalar publik dibayangkan sebagai hasil dari proses yang rasional dari masing-masing identitas atau menjadi nalar rasional universal sekaligus obyektif yang bisa mengatasi partikularitas nalar masing-masing identitas. Ironisnya, para pemikir demokrasi pluralis liberal memaknai beragam identitas yang berinteraksi dalam keragaman dan menghadirkan konflik tersebut secara esensial serta menafsir ketegangan dan antagonisme dalam kaca mata dualisme bukan dualistik (bandingkan Mouffe, 2005: 30).

Yang terlupakan adalah apa yang disebut sebagai nalar publik lebih merupakan 'konsensus' intersubjektif dimana masing-masing akan selalu tunduk pada rasionalitas terbatas mereka dan tidak akan pernah benar-

benar menemukan rasional universal dan obyektif dan tidak pernah akan ada totalitas sosial. Lebih jauh, komunikasi intersubjektif inilah yang menjadi ranah kehadiran kepentingan publik karena kepentingan itu sebenarnya tidak pernah hadir pra konsepsi kecuali dalam ranah politis tersebut. Sebab pada hakekatnya kekuasaan bukanlah sebuah relasi eksternal yang menghadirkan dua pra konsepsi identitas (dengan kepentingan yang sudah dirumuskan secara jelas) karena kekuasaan itu lah justru yang mengkonstitusi identitas (dan kepentingannya) (Mouffe, 2006: 247). Oleh karena itu nalar publik bukanlah bersifat rasional universal dan obyektif tapi lebih merupakan logika ekuivalensi (*logic of equivalence*) yang dihasilkan dari proses-proses sedimentasi yang serupa atau ekuivalen sekaligus dislokasi terhadap yang berbeda (Laclau & Mouffe, 1985: 127). Apa yang disebut dengan logika ekuivalensi di sini adalah menegasikan identitas-identitas partikular subyek dalam sebuah diskursus dengan menghadirkan identitas yang benar-benar negatif yang dianggap sebagai ancaman terhadap mereka (Howarth, 2000: 107). Contoh yang sederhana, dalam pengalaman negara-negara skandinavia, adalah bagaimana gagasan kesejahteraan dikonstruksi oleh beragam identitas, kelas sosial, ideologi melalui konsepsi *people's home* yang dibedakan dengan gagasan fasisme Nazi dan komunisme Rusia (lihat Esping-Andersen, 1985).

Radikalisasi Praktik Diskursus dan Bangunan Demokrasi Agonistik

Bila antagonisme sosial menjadi keniscayaan lalu bagaimana menghadirkan praktik politik yang diskursif sekaligus memungkinkan komitmen praktik-praktik deliberasi keseharian bisa berjalan sekaligus menjadi ruang yang bisa mendorong seluruh warga negara untuk berusaha menemukan konsensus/dikonsensus tentang *common goods*? Dengan catatan, pilihan ini tidak bermaksud untuk mempersoalkan semangat libertarian yang menekankan kebebasan dan kesetaraan sebagai dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan dalam bangunan politik modern. Pilihan lebih mempersoalkan proses implementasi semangat libertarian yang justru seringkali mematikan semangat-semangat itu sendiri.

Tentu saja, model tersebut tidak bisa kita temui dalam model demokrasi prosedural yang terlalu hirau dengan agregasi preferensi-preferensi warga dalam memilih isu publik serta menentukan partai

dan pejabat publik. Fluiditas dan pluralitas agensi yang sekaligus menggambarkan adanya rekonfigurasi entitas masyarakat, komunitas dan individu; ketidaklengkapan sistem pengetahuan (faliabilitas) dan rasionalitas aktor (*bounded rationality*), menjadi sederetan praktik sosial yang pasti gagal terbaca oleh model demokrasi prosedural.

Bangunan demokrasi prosedural yang kini menjadi arus utama model dalam interaksi politik masyarakat modern dapat dipastikan tidak akan mampu menopang dan merespon segala perubahan tersebut karena sifatnya yang elitis dan keterjebakan pada isu-isu politik yang metanaratif sehingga tidak fleksibilitas (*fix term*). Mekanisme demokrasi prosedural seperti ini akan mempunyai kecenderungan untuk lebih mengusung *majotarian rule* sehingga komunitas-komunitas rentan seringkali tidak punya ruang untuk bersuara.

Ketidakkampuan demokrasi prosedural merespon berbagai kompleksitas problem sosial baru ini merupakan refleksi dari kegagalan rasionalitas instrumental -sebagai basis dasarnya- dalam mengkreasi realitas yang selalu dianggap objektif. Rasionalitas instrumental -yang didefinisikan sebagai kapasitas untuk mengkreasi, menseleksi dan mempola sarana yang baik untuk mencapai tujuan- gagal menjawab berbagai perubahan dan masalah sosial baru tersebut dikarenakan ada sifat essensial yang cenderung "membajak" esensi seluruh perilaku manusia melekat di dalamnya. Akibatnya rasionalitas instrumental: (1) merusak aspek-aspek yang bersifat lebih "bersahabat, spontan, egalitarian, dan secara instruktif bermakna dalam asosiasi manusia, (2) anti demokratis, (3) merepresi individu, (4) tidak efektif dalam merespon kompleksitas masalah sosial, (5) membuat analisa kebijakan yang lebih efektif dan tepat menjadi tidak mungkin, (6) menciptakan instrumen-instrumen dan metode-metode dalam ilmu sosial yang tidak tepat dan tidak berguna (Dryzek, 1990: 4-5).

Maka kehadiran model demokrasi yang mampu mendorong radikalisasi praktik diskursif/deliberatif menjadi niscaya. Sebab model demokrasi diskursif adalah model demokrasi yang mampu menstimulus kehadiran narasi-narasi kecil yang beragam untuk berkontestasi dalam ruang publik dan mampu mengelola keragaman dan konflik yang ada atau memiliki kapasitas untuk mentransformasikan konflik yang hadir di dalamnya. Sebuah model demokrasi yang tidak hanya menjadi ruang transformatif bagi mereka yang terlibat dalam publik namun sekaligus

menjadi ruang regulatif yang mendisplinkan proses kontestasi dan negosiasi di ruang publik dalam konteks yang lebih luas (kultural dan sosial) dan bukan sekedar aturan formal (legal) (Bandingkan Saward, 1998: 27).

Tujuannya adalah radikalisisasi praktik politik dengan cara mendorong berbagai perdebatan politik ke ranah publik yang lebih luas agar tidak lagi menjadi klaim domain negara belaka. Bukan hanya aparat negara dan wakil-wakil rakyat, melainkan seluruh warga negara berpartisipasi di dalam wacana politis untuk mengambil keputusan politis bersama. "Tempat" kedaulatan rakyat bergeser dari proses pengambilan keputusan di parlemen ke proses partisipatif dalam ruang-ruang publik. Kedaulatan rakyat bukanlah "subtansi" yang membeku dalam lembaga perkumpulan wakil-wakil rakyat namun juga terdapat dalam pelbagai forum-frum warga, Ornop, gerakan sosial, dsb (Bandingkan Hardiman, 2001: 52).

Setidaknya ada 4 prinsip normatif yang yang selalu hendak ditekankan dalam bangunan demokrasi diskursif ini, yaitu (Young, 2004: 228-229): *pertama*, inklusi (*inclusion*). Dalam demokrasi diskursif, sebuah keputusan demokratis akan memiliki legitimasi yang kokoh hanya apabila seluruh pihak yang terkena efek atau menjadi dari efek keputusan tersebut dilibatkan dalam proses diskusi dan pembuatan keputusan. Yang dimaksud berefek di sini adalah berbagai keputusan dan kebijakan tersebut mengkondisikan pilihan-pilihan aktor ketika bertindak.

Kedua, kesetaraan (*equity*). Komunitas atau individu yang terkena dampak bukan hanya dilibatkan tapi juga memiliki kesamaan hak dan kesempatan efektif yang sama untuk mengekspresikan kepentingan dan kehirauan mereka. Mereka juga berhak memiliki kesempatan yang sama untuk mempertanyakan serta mengkritik argumen satu sama lain. Hal ini hanya akan terjadi apabila terjadi kondisi bebas dari adanya dominasi.

Ketiga, beralasan (*reasonableness*). Dalam konteks demokrasi diskursif, istilah "reasonableness" lebih mengacu pada serangkaian karakter yang dimiliki oleh partisipan diskusi dibandingkan pada subtansi yang dikontribusikan oleh peserta. Komunitas yang *reasonable* biasanya akan datang dalam diskusi untuk mencari solusi terhadap persoalan. Kalaupun tidak tercapai kesepakatan setidaknya terjadi proses-proses untuk mencapai kesepakatan tersebut yang sudah terpola.

Keempat, ke-publik-an (*publicity*). Adanya prinsip-prinsip inklusi, kesetaraan, *reasonableness* telah mendorong adanya "public" yang

didalamnya masyarakat saling bertanggungjawab satu sama lain. Sebuah ranah publik merupakan muara dari pluralitas pengalaman, sejarah, komitmen, kepentingan dan tujuan baik dari individu maupun kolektif, yang bertemu satu sama lain untuk mendiskusikan masalah kolektif.

Dengan kata lain, bangunan demokrasi tersebut seyogyanya (Cohen, 1991: 18-19): (1) bisa menjadi ruang dimana debat-debat politik dikelola untuk selalu menemukan logika ekuivalensi tentang *common goods* mereka, (2) akan memberikan implikasi yang egaliter yang ditunjukkan dari terbukanya jalan bagi peran warga negara yang kuat, (3) menjadi sarana untuk menyediakan basis bagi terciptanya *self-respect* yang mendorong adanya rasa kompetensi politik (*sense of political competence*) dan akan kontributif terhadap pembentukan rasa keadilan (*sense of justice*).

Lebih jauh, tulisan ini ingin menawarkan radikalisasi demokrasi diskursif dengan menghadirkan model demokrasi agonistik. Model demokrasi agonistik menekankan kembali tentang konflik sebagai sebuah keniscayaan dalam proses kehidupan politik sekaligus ingin menekankan ketidakmungkinan untuk menemukan prosedur-prosedur penentuan keputusan yang final, rasional dan netral dikarenakan ketersebaran kekuasaan itu sendiri dan pluralitas nilai yang ada. Dengan kata lain, meskipun sama-sama mengusung watak diskursif dalam proses politik, model ini mengkritik cara pikir demokrasi deliberatif yang mencari hal yang tidak mungkin –yaitu konsensus- dengan argumen-argumen yang rasional sehingga cenderung menafikan atau mengabaikan keniscayaan watak politis (*the political*), antagonisme atau kontijensi dari setiap babak politik (Crowder, 2006).

Justru yang dilakukan oleh tawaran model ini adalah meradikalisasi antagonisme, konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang ada sekaligus mentransformasikannya dengan jalan-jalan atau cara-cara yang non desktruktif. Cara yang dilakukan adalah mentransformasikan antagonisme-antagonisme sosial menjadi agonisme. Bila antagonisme mengacu pada dua pihak bermusuhan yang berkepentingan untuk menghabisi yang lain, maka gagasan agonisme mengacu pada dua pihak yang saling berseberangan namun pada saat yang sama memberikan pengakuan satu sama lain sebagai pihak yang masing-masing absah dalam memiliki pandangan (ibid: 9; Mouffe, 2005: 52).

Hal yang paling penting untuk dilakukan saat ini adalah mendorong dan meradikalisasi berbagai proses politik demokratik yang ada untuk

menstransformasikan struktur kekuasaan yang ada dan mengkonstruksi hegemoni baru melalui deliberasi publik. Kehadiran hegemoni baru tersebut akan berimplikasi terhadap terpolanya rantai ekuivalensi diantara perjuangan-perjuangan demokratis yang beragam, baik gerakan politik lama maupun yang baru, untuk menemukan kembali keinginan kolektif, *common goods*, dsb (Mouffe, 2005: 53).

*Wallahu a'lam bishshowwab wal haq. ******

Daftar Pustaka:

- Bevir, Mark (eds.), 2007, *Encyclopedia of Governance*, Sage Publication.
- Cohen, Joshua, 1991, "Deliberation and Democratic Legitimacy" dalam Alan Hamlin dan Philip Pettit, *The Good Polity: Normative Analysis of the State*, Basil Blackwell.
- Collier, David Steven Levitsky Democracy 'With Adjectives': Conceptual Innovation in Comparative Research
- Dryzek, John S., 1990, *Discursive Democracy: Politics, Policy and Political Science*, Cambridge.
- Eriksen, Erik Oddvar, 1996, "Justification of Needs in the Welfare State" dalam Erik Oddvar Eriksen & Jørn Loftager (eds.), *The Rationality of the Welfare State*, Scandinavian University Press.
- Esping-Andersen, Gøsta, 1985, *Politics Against Markets: The Social Democratic Road to Power*, Princeton University Press.
- Foster, Andrew D. & Mark R. Rozensweig, 2004, *Democratization and the Distribution of Local Public Goods in Poor Rural Economy*, The research is supported in part by grants NIH HD30907 and NSF, SBR93-08405.
- Habermas, Jurgen, 1996, *Facts and Norms: Contributions to a discourse Theory of Law and Democracy*, Polity Press.

- Hardiman, Francisco Budi, 2001, "Habermas Tentang Demokrasi di Asia", *Kalam*, 17, 2001.
- Hardiman, Francisco Budi, 2005, "Ruang Publik Politis: Komunikasi Politis dalam Masyarakat Majemuk" dalam Sunaryo H.W (ed.), *Republik Tanpa Ruang Publik*, IRE Press.
- Howarth, David, 2000, *Discourse*, Open University Press.
- Kwon, Huck-ju, 2007, "Transforming The Developmental Welfare State in East Asia", *DESA Working Paper*, No. 40, June 2007.
- Laclau, Ernesto & Chantal Mouffe, 1985, *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a radical Democratic Politics*, Verso.
- Laclau, Ernesto, 2007, *On Populist Reason*, Verso.
- Marchart, Oliver, 2007, *Post-Foundational Political Thought: Political Difference in Nancy, Lefort, Badiou, and Laclau*, Edinburgh University Press.
- Miller, Peter N., 2004, *Defining Common Good: Empire, Religion and Philosophy in Eighteenth-Century Britarian*, Cambridge University Press.
- Mouffe, Chantal, 2005, *On the Political*, Routledge.
- Mouffe, Chantal, 2006, "Democracy, Power and the Political" dalam Seyla Benhabib (ed.), *Democracy and Difference*, Princeton University Press
- Nancy, Jean-Luc, 2007, "on the Multiple Sense of Democracy" dalam Martin Mcquillan (ed.), *The Politics of Deconstruction: Jacques Derrida and the Other of Philosophy*, Pluto Press.
- O'Brien, M. & Penna S., 1998, *Theorising Welfare*, Sage Publication.
- Postema, Gerald J., 2005a, "Public Practical Reason: An Archeology", *Social Philosophy & Policy*, Volume 12 (Winter, 1995): 43-86.
- Postema, Gerald J., 2005b, "Public Practical Reason: Political Practices", In Ian Saphiro and Judith DW (eds.), *NOMOS XXXVII: Theory and Practices*, new York university Press.
- Przeworski, Adam, Michael E. Alvarez, Jose Antonio Cheibub & Fernando Limongi, 2000, *Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950 – 1990*, Cambridge University Press.

- Rawls, John, 1997, "Public Reason" dalam James Bohman dan William Rehg (eds.), *Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics*, MIT Press
- Rawls, John, 2004, "Justice As Fairness", dalam Colin Farrelly (ed.), *Contemporary Political Theory: A Reader*, Sage Publication.
- Sargeson, Sally, 2002, "The Contested Nature of Collective Goods in East and Southeast Asia", Sally Sargeson (ed.), *Collective Goods, Collective Future in Asia*, Routledge.
- Saward, Michael, 1998, *The Terms of Democracy*, Polity Press.
- Sen, Amartya, 1999, *Development As Freedom*, Anchors Books.
- Sen, Amartya, 2001, *Masih Adakah harapan Bagi Kaum Miskin?: Sebuah Perbincangan tentang Etika dan ilmu Ekonomi di Fajar Milineum Baru*, Mizan.
- Weeden, Lisa, 2004, "Concepts and Commitmens in the Study of Democracy" dalam Ian Saphiro, Roger M. Smith, dan Tarek E. Masoud (eds.), *Problem and Methods in the Study of Politics*, Cambridge.
- Young, Iris Marion, 2004, "The Deliberative Model" dalam Colin Farrelly (ed.), *Contemporary Political Theory: A Reader*, Sage Publication.